

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan agenda reformasi birokrasi dilingkungan lembaga Peradilan, yang pada akhirnya dapat menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) yang sasaran pokoknya adalah penyelenggaraan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas pengabdian di bidang penegakan keadilan untuk mencapai visi dan misi Mahkamah Agung.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selain memenuhi agenda reformasi birokrasi merupakan suatu kewajiban pertanggungjawaban Akuntabilitas Lembaga selaras dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka LAKIP juga merupakan suatu perwujudan tanggung jawab, transparansi dan menyangkut suatu bentuk Akuntabilitas dari suatu Lembaga.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan kinerja tahun anggaran 2010, Mahkamah Syar'iyah Aceh merasa bertanggungjawab untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Instruksi Presiden sebagaimana tersebut diatas, sehingga program kerja dan capaian kinerja yang di tetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka seluruh satuan kerja dibawah lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan sebagai acuan dalam rencana kinerja yang akan diwujudkan pada setiap

tahunnya. LAKIP tahun 2011 ini diharapkan lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Syar'iyah.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Mahkamah Syar'iyah Aceh diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu tersusunnya LAKIP ini.

Banda Aceh, 07 Februari 2012  
KETUA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. H. IDRIS MAHMUDY, SH., MH.**  
NIP. 19491212 197803 1 003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>IKHTISAR</b> .....	v

### **BAB I. : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	4
C. Kebijakan Umum Tahun 2010 .....	5
1. Arah Kebijakan .....	7
2. Sasaran .....	8
3. Program-program Tahun 2010 .....	9
D. Struktur Organisasi dan Jumlah Pegawai .....	10
E. Sistematika Penyajian .....	11

### **BAB II. : RENCANA STRATEGIS & PENETAPAN KINERJA**

A. Rencana Kerja .....	13
1. Visi .....	13
2. Misi .....	14
B. Penetapan Kinerja 2010 .....	15

### **BAB III. : AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Pengukuran Kinerja .....	17
B. Evaluasi Kinerja .....	18
C. Analisis Akuntabilitas Kinerja .....	18
D. Aspek Keuangan .....	19
1. Anggaran Rutin .....	19
2. Anggaran Pembangunan/Pengadaan/Sarana dan Prasarana .....	20
E. Analisis Capaian Kinerja Mahkamah Syariah Aceh 2010 .....	24

### **BAB IV. : PENUTUP**

A. Keberhasilan .....	28
B. Hambatan / Masalah .....	28
C. Pemecahan Masalah .....	29

### **LAMPIRAN**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung serta penyelarasan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 ini menjadi sesuatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai kemanfaatan sebagai fungsi kontrol dari pelaksanaan kinerja satu tahun dan merupakan salah satu perangkat dalam penerapan fungsi manajemen di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka disusunlah suatu bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tahun 2010.

Adapun LAKIP yang telah disusun ini pada intinya adalah melaporkan "Pencapaian Kinerja" (Performance Result) selama tahun 2010, yang mengacu pada "Rencana Kinerja" (Performance Plan) tahun 2010 dan secara keseluruhan berpedoman pada Rencana dan Strategi (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2010-2014.

Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan supporting unit dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung, secara langsung sebagai pengelola anggaran, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan anggaran yang tersedia.